

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 487.22/ 08352
 TANGGAL : / Agustus 2017

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR : 847.22/ 08351

Pada hari ini, Jum'at tanggal 28 bulan Juli tahun 2017 bertempat di Ruang Rapat I Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Surat usul/ laporan/ pengaduan dari SKPD/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Berita Acara Pemeriksaan / Berita acara permintaan keterangan dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS	Tidak terbatas
Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi : - Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
SK Hukum Disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

Identitas (2)

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Surat usul Cerai / SK Cerai / Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya Surat Ijin Perceraian
Data hasil check up perorangan PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data hasil tes potensi perorangan PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data rekam medik pasien Poliklinik	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Biodata elektronik PNS (database) yang terkait data pribadi	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Berkas/ Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/ Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Daftar rencana penempatan CPNS/ PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mencegah kolusi	Sampai dengan penyerahan SK
Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Akan mengungkap hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
		Dibuka	ditutup	
Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi	Sampai dengan pelantikan
Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural Prov/Kab/Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Provinsi/Kab/Kota - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
Data Nilai dan rangking peserta ujian Prov/Kab/Kota - CPNS - Ujian Dinas - Ujian KPPI - Ujian Penggunaan Gelar	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	- Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
		Dibuka	ditutup	
Dokumen Penawaran Kontrak yang pelaksanaannya sedang dalam proses di BKD Prov. Jateng	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j • Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 	Muncul Persaingan Usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga Obyektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan Barang/jasa selesai.
Rincian HPS (harga Perkiraan sendiri) yang pelaksanaannya sedang dalam proses di BKD BKD Prov. Jateng	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j • Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses pengadaan Barang/jasa selesai.
Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan yang pelaksanaannya sedang berjalan di BKD BKD Prov. Jateng	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j • PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 	Menghambat proses kegiatan/administrasi pembukuan	Dapat menjaga kelancaran kegiatan/tertibnya proses administrasi pembukuan	Terbatas sampai dengan selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh auditor yang berkompeten

Bahwa (5)